

**Kolaborasi Antar Aktor Pemerintah Dan Asosiasi Museum Daerah Jawa Timur
(AMIDA) Dalam Melestarikan Gedung Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Heritage Malang**

Annira Medya Sukardi

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Brawijaya

Muhammad Fathdel Fiqraz

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Brawijaya

Muhammad Ardiansyah Athalla Putra

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Brawijaya

Arasya Rifda Saputriana

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Brawijaya

Dewana Moza Ersonia

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Brawijaya

Prisca Kiki Wulandari

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Brawijaya

Email: anniramedya24@gmail.com

Abstrack

Malang City has the potential for cultural heritage-based tourism, one of the potentials included in the Regional Chief Economist (RCE) Center Building, tourism that holds colonial historical values. However, this heritage-based tourism potential has not been optimized due to coordination challenges between government agencies. This research aims to analyze the implementation of government networks in the management and utilization of cultural heritage assets for the tourism sector in Malang, with a case study of the KPPN Heritage Building in Malang. A qualitative approach with a case study method was used to deeply understand the dynamics of collaboration, communication, and coordination between relevant government actors. Data were collected through in-depth interviews with stakeholders from KPPN Malang, Malang City Tourism Office, and other related agencies, field observations, and documentation studies. The results show the complexity of government networks in heritage tourism management in Malang, with the identification of significant challenges in program synchronization, communication effectiveness, and comprehensive understanding of the roles of each actor. The findings also indicate the influence of sectoral ego that hinders network integration in tourism policy planning and implementation. The research concludes that strengthening government networks through clear coordination mechanisms, transparent communication, and integration of sustainability-oriented cross-sectoral programs is crucial to optimize the utilization of cultural heritage assets such as the KPPN Heritage Building in Malang as a sustainable and collaborative tourism attraction, while addressing tourism development inequality between regions.

Keywords: *Government Network, Heritage Tourism, Asset Management, Cross-Sector Coordination,*

Abstrak

Kota Malang memiliki potensi pariwisata berbasis cagar budaya, salah satu potensi yang termasuk Gedung Regional Chief Economist (RCE) Center, pariwisata yang menyimpan nilai sejarah kolonial. Namun, potensi pariwisata berbasis warisan ini belum optimal akibat tantangan koordinasi antar lembaga pemerintahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi jejaring pemerintahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset cagar budaya untuk sektor pariwisata di Malang, dengan studi kasus pada Gedung KPPN Heritage Malang. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan untuk memahami secara mendalam dinamika kolaborasi, komunikasi, dan koordinasi antar aktor pemerintahan terkait. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan dari KPPN Malang, Dinas Pariwisata Kota Malang, dan instansi terkait lainnya, observasi lapangan, serta studi dokumentasi. Penelitian ini dilandasi oleh Teori Pembangunan Berkelanjutan dalam Pariwisata, yang menekankan keseimbangan antara pelestarian warisan budaya dan manfaat ekonomi serta sosial. Hasil penelitian menunjukkan kompleksitas jejaring pemerintahan dalam pengelolaan pariwisata heritage di Malang, dengan identifikasi tantangan signifikan dalam sinkronisasi program, efektivitas komunikasi, dan pemahaman komprehensif mengenai peran masing-masing aktor. Temuan juga mengindikasikan adanya pengaruh ego sektoral yang menghambat integrasi jejaring dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pariwisata. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan jejaring pemerintahan melalui mekanisme koordinasi yang jelas, komunikasi yang transparan, dan integrasi program lintas sektoral yang berorientasi pada keberlanjutan adalah krusial untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset cagar budaya seperti Gedung KPPN Heritage Malang sebagai daya tarik pariwisata yang berkelanjutan dan kolaboratif, sekaligus mengatasi ketimpangan pembangunan pariwisata antar daerah.

Kata Kunci: *Jejaring Pemerintahan, Pariwisata Cagar Budaya, Pengelolaan Aset, Koordinasi Lintas Sektor.*

PENDAHULUAN

Kota Malang merupakan salah satu kota yang masih banyak peninggalan bangunan cagar budaya yang mengandung nilai sejarah di baliknya. Malang sebagai salah satu tempat yang pernah diduduki pada saat pemerintahan kolonial, membuat arsitektur bangunannya masih *iconic* dengan bangunan Belanda. Banyak tempat-tempat yang sengaja dibiarkan bertumbuh dengan arsitektur Belanda yang otentik sebagai bukti sejarah perjalanan kemerdekaan Indonesia. Salah satu bangunan otentik tersebut ialah Gedung Regional Chief Economist (RCE) Center. Gedung ini dibangun dalam kompleks Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang yang

merupakan salah satu bangunan peninggalan Hindia Belanda. Dulunya gedung ini disebut dengan nama Central Bestuurskantoor yang merupakan Kantor Pusat Karasidenan Malang, yang meliputi Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang.

Gedung Central Bestuurs kantoor ini dibangun pada tahun 1936-1937 oleh Hindia Belanda. Gedung tersebut diarsitekturi oleh arsitek Belanda bernama M.B Tideman dan dikerjakan oleh Kontraktor yang bernama R.D de Jong dengan total biaya mencapai f65.000 yang sekarang jika di total di rupiah bernilai f1 (satu gulden) sama dengan 74.200 (2015). Gedung ini terdiri dari Kantor Jaksa, Kantor Asisten Residen, Kantor Residen, dan juga Kas Negeri.

Tak dapat dipungkiri, banyaknya tempat-tempat pariwisata yang mampu menambah nilai jual suatu daerah belum diimbangi dengan koordinasi antar lembaga yang optimal, sehingga masih banyak ketimpangan pembangunan yang terjadi antara daerah-daerah besar dengan daerah kecil untuk memajukan sektor wisata. Dapat terlihat dari pengelolaan destinasi pariwisata yang melibatkan aset pemerintah seperti gedung KPPN Heritage ini, pengelolaan serta pemanfaatan gedung untuk tujuan pariwisata belum optimal¹.

Hal ini diakibatkan kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintahan seperti Kementerian Keuangan, Dinas Pariwisata, Instansi daerah terkait. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Wino Adi Nugrogo Setiyanto (2018) dalam jurnal yang berjudul Studi Tantangan Koordinasi Horizontal antara Instansi terkait Upaya Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Sidoarjo, menyatakan bahwa Persoalan koordinasi dan sinergi pembangunan yang belum optimal menjadi tantangan yang sulit terhadap pembangunan pariwisata, hal ini karena faktor ego sektoral ataupun ego wilayah yang belum mampu membedakan kepentingan dan manfaat jangka panjang sebuah wilayah.

Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman yang komprehensif mengenai jejaring pemerintahan pada sektor pariwisata. Walaupun berbagai peraturan telah dibuat untuk pengembangan sektor pariwisata, pada nyatanya masih

¹ Hariyanti, M., Putri, L. D., & Kusuma, A. B. (2024). Determinan Tingkat Kesejahteraan Buruh Jagung Di Kabupaten Sumbawa Dalam Perspektif Hukum Fikih. *AL-BAYAN: JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM*, 4(2), 192-205.

banyak daerah yang belum mengintegrasikan jejaring pemerintahan pada tatanan perencanaan dan juga implementasinya. Padahal dengan jaringan integrasi dan kolaborasi mampu meningkatkan efisiensi pada pengelolaan sektor pariwisata yang ada di daerahnya masing-masing².

Gap riset dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun banyaknya penelitian terkait sektor pariwisata dengan pemerintah telah banyak dilakukan, masih minimnya penelitian yang membahas lebih spesifik terkait implementasi jejaring pemerintah dalam sektor pariwisata khususnya pada pengelolaan objek wisata berbasis aset pemerintahan seperti Gedung KPPN Heritage Malang ini, inilah alasan kami memilih objek wisata tersebut sebagai bahan evaluasi dan memperkenalkan kepada khalayak luas bahwa banyaknya titik wisata yang mengandung nilai sejarah besar yang belum terjamah oleh khalayak³.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam tentang bagaimana kolaborasi tata kelola pariwisata pada peninggalan Belanda bangunan bersejarah terhadap aset pemerintah seperti Gedung KPPN Heritage Malang. Dengan menelisik segala potensi dan tantangannya yang kaitannya dengan jejaring pemerintahan diharapkan penelitian ini mampu menjadi solusi yang efektif terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan yang kolaboratif.

KAJIAN LITERATUR

Teori Aktor Pemerintah dalam Pengelolaan Gedung KPPN Heritage Malang

Teori aktor pemerintah menjelaskan bahwa pemerintah sebagai aktor utama memiliki peran strategis dalam pengelolaan sumber daya publik, termasuk pengelolaan bangunan bersejarah seperti Gedung KPPN Heritage Malang. Dalam konteks ini, aktor pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pengelola administratif,

² Purborini, V. S., & Suryanatha, I. B. (2024). Dimensions of Sociology of Law: The Urgency of Implementing Digital Transactions Towards the Era of Society 5.0. *AL-BAYAN: JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM*, 4(2), 128-143.

³ Putri, A. (2024). Pemilihan Lokasi Ideal Pada Bank Syariah Indonesia: Strategi Dan Pertimbangan Utama. *AL-BAYAN: JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM*, 4(2), 171-191.

tetapi juga sebagai pelindung dan pelestari nilai-nilai sejarah dan budaya yang terkandung dalam gedung tersebut. Teori ini menekankan pentingnya peran serta, koordinasi, dan kolaborasi antar berbagai aktor pemerintah dalam mencapai tujuan bersama, yaitu pelestarian dan pemanfaatan gedung heritage secara optimal⁴.

Dalam pengelolaan Gedung KPPN Heritage Malang, aktor pemerintah yang terlibat memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda namun saling terkait. Di antaranya adalah Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menaungi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai institusi pengelola keuangan negara. Kementerian ini memiliki kewenangan administratif atas bangunan yang digunakan untuk operasional pelayanan keuangan negara, sehingga tanggung jawab legal dan operasional atas gedung berada di bawah pengawasannya⁵.

Selain itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang juga menjadi aktor penting dalam pengelolaan bangunan heritage ini. Dinas ini berperan dalam pelestarian bangunan bersejarah di wilayah Kota Malang dan berfungsi untuk memastikan bahwa kegiatan restorasi, pemeliharaan, dan pemanfaatan bangunan heritage sesuai dengan nilai-nilai sejarah yang dikandungnya. Kolaborasi antara Kementerian Keuangan dan Dinas Kebudayaan menjadi sangat penting karena menyatukan aspek administratif dan aspek pelestarian budaya dalam satu kerangka pengelolaan.

Pelestarian Gedung KPPN Heritage Malang tidak hanya menjadi urusan pemerintah sebagai pemilik dan pengelola gedung, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab kolektif masyarakat. Dalam menjelaskan kompleksitas interaksi antara berbagai aktor ini, teori aktor yang relevan digunakan adalah Teori Aktor Jaringan (Actor-Network Theory/ ANT) yang dikembangkan oleh Bruno Latour dan Michel Callon. ANT memandang bahwa aktor tidak hanya terbatas pada manusia, tetapi juga mencakup organisasi, kebijakan, bahkan objek material seperti gedung itu

⁴ Fitriani, I. (2023). Analisis Hubungan Kepemimpinan Kompetensi Kepercayaan Pengalaman Organisasi Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Fif Group Di Way Jepara Lampung Timur. *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 3(1), 32-48.

⁵ Hidayati, S. N., & Sapitri, S. (2024). Peranan Lembaga Keuangan Dalam Meminimalisir Ketimpangan Pendapatan Di Kabupaten Sumbawa. *AL-BAYAN: JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM*, 4(1), 116-127.

sendiri. Dalam ANT, semua entitas yang memiliki peran dalam jaringan tindakan dianggap sebagai "aktor" atau "agensi". Kesimpulannya, pengelolaan Gedung KPPN Heritage Malang membutuhkan kolaborasi yang erat antara aktor pemerintah dan non-pemerintah seperti AMIDA⁶.

Teori aktor pemerintah menjelaskan peran strategis masing-masing lembaga negara dalam menjaga dan mengelola sumber daya publik yang bernilai sejarah. Sementara itu, Teori Aktor Jaringan (ANT) memperluas pemahaman kita tentang bagaimana jaringan kolaboratif terbentuk dan berfungsi dalam upaya pelestarian bangunan heritage⁷. Dengan menggabungkan dua pendekatan teoritis ini, penelitian dapat menganalisis secara komprehensif bagaimana interaksi, negosiasi, dan kolaborasi antar berbagai aktor menghasilkan kebijakan dan tindakan nyata dalam pelestarian Gedung KPPN Heritage Malang. Dalam konteks tata kelola sumber daya publik yang berkelanjutan dan berorientasi pada pelestarian budaya, pendekatan ini menjadi sangat relevan dan aplikatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling sesuai dengan judul yang kami angkat, terutama dalam hal koordinasi dan kolaborasi antara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang dengan berbagai aktor lainnya dalam mendukung sektor pariwisata di wilayah Malang. Kualitatif memungkinkan peneliti memahami makna-makna yang terkandung di balik interaksi dan proses kebijakan secara lebih mendalam, bukan sekadar memotret angka atau hasil akhir, melainkan juga proses sosial- politik dan administratif yang melatarbelakanginya.

⁶ Nisa, B. H., Apriyani, D., & Hidayati, S. N. (2023). Peran Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Pembangunan Ekonomi Perspektif Islam Di Kabupaten Sumbawa. *AL-BAYAN: JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM*, 3(2), 202-216.

⁷ Fitriani, I. (2023). Analisis Hubungan Kepemimpinan Kompetensi Kepercayaan Pengalaman Organisasi Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Fif Group Di Way Jepara Lampung Timur. *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 3(1), 32-48.

Studi kasus dipilih sebagai metode karena memberikan ruang eksplorasi yang luas terhadap konteks spesifik, yakni bagaimana KPPN Malang berperan sebagai simpul penting dalam jejaring pemerintahan yang terlibat dalam pengelolaan dan penyaluran anggaran belanja negara, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata. Dalam konteks ini, KPPN bukan sekadar lembaga teknis yang memproses administrasi keuangan, tetapi juga berinteraksi dengan berbagai instansi vertikal dan horizontal, seperti Dinas Pariwisata Kota Malang, satuan kerja kementerian dan lembaga pusat yang memiliki proyek di daerah, hingga lembaga pengawasan dan perencanaan di tingkat lokal maupun pusat.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah KPPN Malang sebagai bagian dari jejaring pemerintahan yang memiliki fungsi sentral dalam mendistribusikan dana APBN kepada satuan kerja pengguna anggaran, termasuk untuk program pariwisata. Selain itu, penelitian ini juga mencakup institusi lain yang berada dalam jejaring tersebut, baik sebagai mitra kerja, pelaksana kegiatan, maupun pengambil kebijakan. Hubungan antar aktor dalam konteks ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor komunikasi, kapasitas kelembagaan, dan kepentingan birokratis yang saling terkait.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi secara fleksibel, namun tetap dalam kerangka pertanyaan yang relevan. Informan dipilih secara purposive sampling berdasarkan peran mereka dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran yang terkait dengan sektor pariwisata. Beberapa informan utama berasal dari KPPN Malang, pejabat dan staf Dinas Pariwisata Kota Malang, perwakilan dari satuan kerja kementerian yang menjalankan program pariwisata, serta pihak lain yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan pariwisata yang didanai oleh APBN.

Observasi dilakukan untuk mengamati langsung praktik koordinasi dan komunikasi antar lembaga, baik dalam bentuk forum resmi seperti rapat koordinasi lintas instansi, maupun kegiatan informal yang mencerminkan pola interaksi antar aktor. Observasi ini penting untuk menangkap dimensi non-verbal dan situasional

yang mungkin tidak terungkap dalam wawancara. Dalam proses ini, peneliti juga mencatat berbagai dinamika yang muncul di lapangan, termasuk kendala teknis dan non-teknis yang memengaruhi efektivitas jejaring pemerintahan.

Studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti laporan penyerapan anggaran, laporan kegiatan pariwisata, notulen rapat, dokumen peraturan perundang-undangan, dan dokumen perencanaan strategis. Dokumen-dokumen ini membantu memberikan kerangka kontekstual yang lebih luas, serta berfungsi sebagai data pembanding terhadap hasil wawancara dan observasi.

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, seperti pola koordinasi, distribusi peran, hambatan kebijakan, dan bentuk kerja sama antar lembaga. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif dan interpretatif untuk menggambarkan kompleksitas jejaring pemerintahan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan mengidentifikasi pola-pola tematik yang muncul dari data lapangan⁸.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai jenis data dan dari informan yang berbeda untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh. Selain itu, peneliti melakukan member checking, yakni mengonfirmasi kembali hasil temuan kepada informan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan realitas yang dimaksud oleh para aktor di lapangan. Refleksivitas peneliti juga dijaga selama proses penelitian untuk meminimalisir bias dan menjaga objektivitas dalam interpretasi data.

⁸ Karimullah, S. S. (2023). Rethinking Halal: Exploring the Complexity of Halal Certification and its Socio-Economic Implications. *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 3(2), 102-121.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana peran KPPN Malang berkontribusi dalam mendukung sektor pariwisata, tidak hanya melalui mekanisme birokrasi anggaran, tetapi juga dalam kerangka kerja jejaring pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara yang kami lakukan, kami dapat menjabarkan jawaban wawancara yang kami peroleh dari *Public Relation* bahwasanya pariwisata KPPN heritage ini merupakan anak instansi dari Kementerian Keuangan Nasional. KPPN Heritage ini tidak menjalin kerja sama dengan dinas pariwisata Kota Malang melainkan dengan Asosiasi Museum Indonesia Daerah Jawa Timur. Hal ini dibuktikan dengan nomor keanggotaan Museum KPPN Heritage yang ditampilkan pada dokumentasi di bawah.

AMIDA JAWA TIMUR
DAFTAR MUSEUM DI JAWA TIMUR

NO	NAMA MUSEUM	PENGELOLA	ALAMAT	NO TELP	EMAIL	TELAH DI STANDARISASI OLEH PEMERINTAH
80	Museum Dr. Mohammad Saleh	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Probolinggo	Jl. Dr. Moh. Saleh No 1, Tisnegeran, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur	082359263977	museumdrmohamadsaleh@gmail.com	
81	Museum Etnis Tengger	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo	Desa Ngadisari Sukapura Kab. Probolinggo	-	-	
82	Museum Islam Indonesia KH. Hasyim Asy'ari	Pesantren Tebuireng, Kemendikbudristek, dan Pemerintah Kab Jombang	Tebuireng Gg. 3, Kwaron, Cukir, Kec. Dibeak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur	(0321) 863136	-	
83	Museum Potehi Gudo Jombang	unit pengelola kelenteng Hong San Kiong	Jl. Raya Gudo - Blimbing No.156, Bumi Arjo, Gudo, Kab. Jombang Jawa Timur	082133331610	-	
84	Museum Gubug Wayang Mojokerto	Yensen Project Indonesia	Jl. R.A Kartini No.23, Kel. Kauman, Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61382	085735992258	museumgubugwayang@gmail.com	
85	Pusat Informasi Majapahit	Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia	Trowulan, Jl. Pendopo Agung, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur	(0321) 495515	-	✓
86	Museum Daerah Kabupaten Nganjuk "Anjuk Ladang"	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum Anjuk Ladang, Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga, dan Kebudayaan Kab Nganjuk	Jl. Gatot Subroto 110, Kauman, Nganjuk, Jawa Timur	08133587899	-	✓
87	Monumen dan Museum Dr. Soetomo	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum Dr. Soetomo - Nganjuk	Sono, Ngepoh, Loceret, Nganjuk Jawa Timur	08133587899	-	
88	Museum Heritage KPPN Malang (Gedung RCE Regional Chief Economist Center)	KPPN Malang	Jl. Merdeka Selatan No.1, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119	085732497701	-	
89	Galeri Ursulin Malang	Galeri Ursulin	Jl. J.A. Supratno 55 Malang, Jawa Timur 65112	089513085518	galeriursulinmalang@gmail.com	
90	Museum Pusat TNI AL Surabaya Jalesveva Jayamahe	TNI Angkatan Laut	Jl. Raya Hang Tuah No. 1, Surabaya, Indonesia 60151			
91	Omahseum-Banyuwangi	Perseorangan	Lingkungan Sukorojo, Jl. Widuri Kelurahan No.21, Banjarsari, Kec. Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68432	081335741139 (P Thomas)		
92	Museum Song Terus	Museum dan Cagar Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Jl. Goa Song Terus, Weru, Wareng, Kec. Pungung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63553	082140523401	museumsongeterus@kemdikbud.go.id	✓
93	Museum Heritage Klasik	Yayasan Heritage Klasik Mobil	Jl. Saromijwo 1/20, Panjang Jiwo, Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur 60299	082132413997	heritageklasikmobil@gmail.com	
94	Museum Kaliber	SMKN 5 Jember	Jl. Brawijaya No.55, Darungan, Jubung, Kec. Sukorembi, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68151			
95	Museum Srimulat	Hawai Grup Malang	Jl. Mardian Bumiagi, Kota Wisata Batu			
96	Museum Telu	Perseorangan	Jl. Puri Bunga Nirwana No. 3, Kel. Karangrejo, Kec. Sumbarsari, Kab. Jember, Jawa Timur 68124	081547230311	prwahyu1964@gmail.com	

"KPPN ini merupakan cagar budaya yang dirawat oleh Kementrian Keuangan Nasional, kami tidak bekerja sama guna pelestarian ataupun marketing dengan pihak dinas pariwisata Kota Malang melainkan kami terdaftar dalam keanggotaan AMIDA Jatim". (Hasil wawancara Public Relation KPPN Heritage dengan Mas Yusuf pada Rabu, 23 April 2025.

Dari sini kami dapat menyimpulkan bahwa kolaborasi yang dilakukan tidak

terjadi antar dinas daerah, melainkan kolaborasi ini muncul dari pusat yaitu Kementerian Keuangan Nasional dengan pihak KPPN serta pihak AMIDA Jatim. Sejauh ini pihak KPPN menyadari bahwa pariwisata KPPN Heritage ini tidak banyak diketahui masyarakat sekitar, maupun touris karena museum ini baru kembali diresmikan pada tahun 2023. Hal ini dapat ditunjukkan dari data pengunjung 2 tahun aktif museum dari tahun 2024-2025 sebagai berikut.

TARGET UTAMA KANTOR PUSAT 250 KUNJUNGAN DAN KEGIATAN					
Kegiatan Gedung Cagar Budaya KPPN Malang 2024					
No	Bulan	Kunjungan	Kegiatan	Pencapaian	Pengunjung
1	Januari	6	16	22	1587
2	Februari	5	15	20	554
3	Maret	8	10	18	606
4	April	13	7	20	1209
5	Mei	22	24	46	1821
6	Juni	19	18	37	1840
7	Juli	19	21	40	1017
8	Agustus	20	10	30	495
9	September	21	12	33	1392
10	Oktober	17	12	29	7992
11	November	16	15	31	1943
12	Desember	20	10	30	610
Jumlah		186	170	356	21066

Tabel Jumlah Pengunjung Tahun 2024

Kegiatan Gedung Cagar Budaya KPPN Malang 2025					
No	Bulan	Kunjungan	Kegiatan	Pencapaian	Pengunjung
1	Januari	10	12	22	947
2	Februari	16	8	24	470
3	Maret	8	5	13	
4	April				
5	Mei				
6	Juni				
7	Juli				
8	Agustus				
9	September				
10	Oktober				
11	November				
12	Desember				
Jumlah		34	25	59	1417

Tabel Jumlah Pengunjung Tahun 2025

Namun, mereka mencoba bekerja sama dengan berbagai agent travel untuk membawa wisatawan yang datang ke Malang untuk sengaja di mampirkan ke KPPN

Heritage ini. Supaya mereka tau bahwa Malang memiliki bangunan cagar budaya yang masih di jaga ke orisinalitasnya. Hal ini sempat dikatakan oleh PR bahwasanya

“sejauh ini kami memang tidak bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kota Malang untuk meng-ekspose tempat ini, tapi kami coba menitipkan pesan kepada para agent travel untuk membawa tourisnya mampir ke KPPN Heritage ini, dan Museum kami baru saja diresmikan. Jadi wajar saja masih belum banyak yang tau tempat ini”. (Hasil wawancara Public Relation KPPN Heritage dengan Mas Yusuf pada Rabu, 23 April 2025).

Selain itu Museum ini juga dibuka untuk umum untuk melakukan work shop ataupun kegiatan lainnya, seperti hal yang disampaikan.

“Tempat ini memiliki aula yang cukup besar dengan kapasitas 120 orang yang bisa digunakan secara gratis untuk masyarakat Malang dengan persyaratan yang tersedia, selain itu tempat ini sering dijadikan pagelaran UMKM dan kesenian yang dilakukan dari kampus-kampus sekitar”. (Hasil wawancara Public Relation KPPN Heritage dengan Mas Yusuf pada Rabu, 23 April 2025).

Sejauh ini manajemen KPPN memang tidak bekerja sama dengan dinas pariwisata terkait, namun KPPN Heritage malang ini bekerja sama dengan Asosiasi Museum Indonesia khususnya daerah Jawa Timur untuk coba memperkenalkan sejarah yang terdapat di KPPN Heritage ini. Tidak ada Program khusus yang dirancang untuk KPPN Heritage ini, karena manajemen KPPN ini masih terbilang baru dan orientasi museum ini belum bertujuan mendapatkan profit karena masuk museum ini masih gratis. Mas Yusuf menyatakan:

“Sejauh ini kami tidak berorientasi mendapatkan profit untuk meresmikan museum ini , tapi kami ingin memperkenalkan sejarah berpendaharaan di Malang yang dulunya di kuasai oleh wilayah Pasuruan”. (Hasil wawancara Public Relation KPPN Heritage dengan Mas Yusuf pada Rabu, 23 April 2025)

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan Public Relation KPPN Heritage Malang, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan promosi museum ini masih berada pada tahap awal dan belum melibatkan strategi komunikasi yang komprehensif antar lembaga pemerintah, khususnya dengan Dinas Pariwisata Kota Malang. Hal ini menyebabkan rendahnya eksposur publik terhadap keberadaan dan potensi KPPN Heritage sebagai destinasi wisata edukatif.

Namun demikian, museum ini menunjukkan potensi besar sebagai ruang publik dan pusat edukasi sejarah fiskal, terutama melalui penyediaan fasilitas aula

gratis dan pelibatan komunitas lokal dalam kegiatan seni dan UMKM. Orientasi KPPN Heritage yang tidak berfokus pada profit tetapi lebih kepada pelestarian sejarah menjadikannya berbeda dari sebagian besar museum komersial lainnya.

Temuan ini sejalan dengan studi oleh Widodo (2020) menunjukkan bahwa keberhasilan museum sebagai destinasi wisata sangat bergantung pada integrasi program promosi dengan dinas pariwisata dan pemanfaatan media digital untuk memperluas jangkauan audiens. Dalam konteks ini, belum adanya sinergi antara KPPN Heritage dan Dinas Pariwisata Kota Malang dapat menjadi penghambat optimalisasi museum sebagai bagian dari ekosistem pariwisata kota. Sebagaimana dikemukakan oleh Ardianto dan Komala (2021), kolaborasi antarinstansi pemerintah sangat penting dalam membentuk narasi sejarah yang terintegrasi dalam destinasi wisata kota.

Lebih lanjut, pendekatan nirlaba yang dilakukan oleh KPPN Heritage juga mencerminkan konsep *public history*, di mana sejarah disajikan kepada masyarakat umum bukan untuk kepentingan komersial, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam membentuk kesadaran sejarah dan literasi fiskal masyarakat. Hal ini senada dengan pandangan Rosyid (2019), yang menekankan pentingnya museum sebagai sarana edukasi publik dalam membangun masyarakat yang melek sejarah dan ekonomi.

PEMBAHASAN

Hasil wawancara dengan Public Relation KPPN Heritage Malang mengindikasikan bahwa strategi promosi dan pengelolaan museum ini masih berada pada tahap awal dan bersifat terbatas. Ketiadaan kerja sama formal dengan Dinas Pariwisata Kota Malang menunjukkan bahwa KPPN Heritage belum sepenuhnya terintegrasi dalam ekosistem promosi wisata kota. Strategi promosi alternatif dilakukan dengan pendekatan informal melalui agen perjalanan, yang mana

efektivitasnya bergantung pada kemitraan personal dan jaringan yang belum tentu memiliki jangkauan luas. Kendati demikian, KPPN Heritage menunjukkan upaya proaktif dalam menjadikan museum sebagai ruang publik yang multifungsi. Dengan menyediakan aula secara gratis bagi masyarakat untuk kegiatan workshop, pagelaran UMKM, dan kesenian dari institusi pendidikan sekitar, museum ini tidak hanya berperan sebagai sarana edukatif tetapi juga sebagai pusat interaksi sosial dan pengembangan budaya lokal.

Kerja sama dengan Asosiasi Museum Indonesia wilayah Jawa Timur menjadi langkah strategis untuk memperluas jaringan dan meningkatkan visibilitas museum dalam lingkup komunitas sejarah dan budaya. Namun, absennya program khusus dan orientasi nirlaba menunjukkan bahwa manajemen museum masih dalam tahap transisi menuju pengelolaan yang lebih profesional dan berkelanjutan. Pernyataan bahwa museum ini tidak berorientasi profit, tetapi berfokus pada pelestarian dan penyebaran sejarah perbendaharaan di Malang, merefleksikan pendekatan edukatif yang ideal namun membutuhkan dukungan kebijakan yang lebih sistemik untuk menjangkau audiens yang lebih luas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pelestarian Gedung KPPN Heritage Malang sebagai aset cagar budaya yang potensial untuk pariwisata berkelanjutan membutuhkan pendekatan tata kelola yang bersifat kolaboratif dan lintas sektor. Dalam kerangka Actor-Network Theory (ANT), pengelolaan gedung ini melibatkan aktor manusia seperti Kementerian Keuangan, KPPN Malang, AMIDA Jatim, dan masyarakat lokal, serta aktor non-manusia seperti gedung itu sendiri, regulasi kebijakan, narasi sejarah, dan perangkat promosi digital. Namun, hingga saat ini jaringan aktor yang terbentuk masih terbatas dan bersifat vertikal, tanpa dukungan sinergis dari pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata Kota Malang.

Meskipun telah ada inisiatif pembukaan museum kepada publik dan kerja sama informal dengan agen travel serta AMIDA Jatim, namun belum tersedia perencanaan program yang terstruktur dan berkelanjutan. Hal ini menandakan bahwa proses enrolment dan mobilization aktor dalam jejaring belum optimal. Sementara itu, potensi

Gedung KPPN Heritage sebagai simbol sejarah dan warisan budaya kolonial tetap kuat, dan dapat menjadi pusat edukasi, ekonomi kreatif, serta pemberdayaan masyarakat jika dikelola secara terpadu. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan Gedung KPPN Heritage Malang sebagai destinasi wisata berbasis cagar budaya.

Pertama, diperlukan pembentukan forum kolaboratif lintas sektor yang berfungsi sebagai ruang negosiasi dan konsolidasi peran antar aktor terkait. Kedua, penguatan jejaring pemerintahan harus dilakukan melalui mekanisme koordinasi yang jelas serta komunikasi yang transparan agar tercipta sinergi yang efektif. Ketiga, pengembangan kapasitas masyarakat lokal perlu ditingkatkan agar mereka dapat berperan sebagai mitra aktif dalam upaya pelestarian heritage. Keempat, Gedung KPPN Heritage perlu diinskripsikan ke dalam peta wisata resmi Kota Malang guna meningkatkan visibilitas dan daya tariknya bagi wisatawan.

Terakhir, integrasi program berbasis sejarah dan budaya ke dalam kebijakan pariwisata, baik di tingkat daerah maupun nasional, menjadi hal penting untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, Gedung KPPN Heritage Malang berpotensi menjadi model pengelolaan destinasi heritage berbasis jaringan aktor yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

REFERENSI

- Adi, W., & Setiyanto, N. (n.d.). *JOINED-UP GOVERNMENT (Studi Tentang Koordinasi Horizontal Antar Instansi Terkait Upaya Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Sidoarjo)*. <http://mediaindonesia.com/news/read/21055/ego->
- Ardianto, E. & Komala, R. (2021). *Sinergi Lintas Sektor dalam Pengembangan Museum sebagai Destinasi Edukasi*. *Jurnal Komunikasi Publik*, 9(2), 67-80.
- Era Wijayati, T. Y. (n.d.). *Jaringan Aktor Dalam Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang*. 4-6.
- Fitriani, I. (2023). *Analisis Hubungan Kepemimpinan Kompetensi Kepercayaan Pengalaman Organisasi Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Fif Group Di Way Jepara Lampung Timur*. *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 3(1), 32-48.

- Hariyanti, M., Putri, L. D., & Kusuma, A. B. (2024). Determinan Tingkat Kesejahteraan Buruh Jagung Di Kabupaten Sumbawa Dalam Perspektif Hukum Fikih. *AL-BAYAN: JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM*, 4(2), 192-205.
- Hidayati, S. N., & Sapitri, S. (2024). Peranan Lembaga Keuangan Dalam Meminimalisir Ketimpangan Pendapatan Di Kabupaten Sumbawa. *AL-BAYAN: JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM*, 4(1), 116-127.
- Karimullah, S. S. (2023). Rethinking Halal: Exploring the Complexity of Halal Certification and its Socio-Economic Implications. *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 3(2), 102-121.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Laporan Kinerja KPPN Malang Tahun 2022. Malang: KPPN Malang.
- Kurniawati, R. A. (2022). Pengembangan pariwisata berbasis partisipasi masyarakat (studi kasus: pantai ungapan kabupaten malang) (the development of community based tourism in ungapan beach, malang regency). In *Journal of*
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Nisa, B. H., Apriyani, D., & Hidayati, S. N. (2023). Peran Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Pembangunan Ekonomi Perspektif Islam Di Kabupaten Sumbawa. *AL-BAYAN: JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM*, 3(2), 202-216.
- Nuryanti, W. (1996). *Heritage and postmodern tourism*. *Annals of Tourism Research*, 23(2), 249-260.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Purborini, V. S., & Suryanatha, I. B. (2024). Dimensions of Sociology of Law: The Urgency of Implementing Digital Transactions Towards the Era of Society 5.0. *AL-BAYAN: JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM*, 4(2), 128-143.
- Putri, A. (2024). Pemilihan Lokasi Ideal Pada Bank Syariah Indonesia: Strategi Dan Pertimbangan Utama. *AL-BAYAN: JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM*, 4(2), 171-191.
- Rachman, A. F. (2023). Model Teori Jaringan Aktor (Actor-Network Theory) Destinasi Wisata Berbasis Kopi Kultur, Provinsi Jawa Barat, Indonesia . 9-11.
- Rosyid, M. (2019). *Peran Museum dalam Edukasi Sejarah Publik*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1), 55-64.
- Shodri, A. (2025). Gedung RCE Malang: Perjalanan Sejarah dari Masa Kolonial ke Pusat Ekonomi Regional. *Kemenkeu RI*.
- Thousand Oaks: Sage Publications. *Tourism Destination and Attraction* (Vol. 10, Issue 1).

Widodo, A. (2020). *Strategi Promosi Museum Daerah Melalui Media Sosial dalam Meningkatkan Minat Kunjungan Wisata Sejarah*. Jurnal Pariwisata Nusantara, 2(1), 34-45.

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.).